



BANG AWAS!

Media Informasi Bawaslu Babel

OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

“Transformasi Era Baru Bawaslu Babel”



KETERBUKAAN INFORMASI JADI
STRATEGI PENCEGAHAN
PELANGGARAN **19**

BAWASLU BABEL AJAK
STAKEHOLDER KOLABORASI
LAKUKAN PENCEGAHAN **7**

MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI MELALUI EVALUASI
MATURITAS SPIP **23**

Daftar Isi

SAPA REDAKSI 3

PENGAWASAN MELEKAT
SEBAGAI STRATEGI
PENCEGAHAN 4

5 STRATEGI DAN POLEMIK
PENGAWASAN TAHAPAN SYARAT
BAKAL CALON LEGISLATIF

BAWASLU BABEL AJAK
STAKEHOLDER KOLABORASI
LAKUKAN PENCEGAHAN 7

9 SOSIALISASI JADI LANGKAH
PENCEGAHAN BAWASLU

KOBARKAN SEMANGAT
PENCEGAHAN KE JAJARAN
PENGAWAS 10

11 PETAKAN KERAWAN DPS
YANG BERPOTENSI KONFLIK

KAWAL HAK PILIH HINGGA KE
KAWASAN PERTAMBANGAN 12

13 KAWAL HAK PILIH
HINGGA KE PULAU TERLUAR

PENTINGNYA PENGUATAN
KELAMBAGAAN DALAM
FUNGSI PENGAWASAN 15

16 MAKSIMALKAN SIGAP LAPOR
DAN JDIH DEMI CEGAH
PELANGGARAN PEMILU

BAWASLU DAN KPU HARUS
PUNYA KOMITMEN BERSAMA
DALAM MENEMUKAN DUGAAN
PELANGGARAN 17

KETERBUKAAN INFORMASI JADI
STRATEGI PENCEGAHAN
PELANGGARAN 19

BAWASLU DAN PEMPROV BABEL
TANDATANGANI BERITA ACARA
DANA HIBAH PILKADA 2024 21

MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI MELALUI EVALUASI
MATURITAS SPIP 23

STRATEGI PERENCANAAN
KEUANGAN JELANG
PILKADA 2024 24

26 OPINI

Galeri 28

SAPA REDAKSI



SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

EM Osykar, S.IP., M.Sc

Sahirin, S.Pd.I

Jafri, S.Pd.Si.

Dewi Rusmala, S.Pd. MPd.

Andi Budi Prayitno

REDAKTUR :

Roy M. Siagian, S.Sos.,M.Si

EDITOR:

Rogrius Sinulingga, S.E.

FOTOGRAFER :

Rini Oktavyanti, S.IP.

DESAIN GRAFIS :

Musri Agustian, A.Md.

PENULIS ARTIKEL :

Jazzkyanda, S.H.

Syahril, A.Md.

Abdul Fakhri S.H.

Anne Indah Yusnita, S.H.

ALAMAT REDAKSI :

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman
Terpadu, Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Jl. Pulau Mendanau No. 2
Air Itam Pangkalpinang, Indonesia

**Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Awas !!!**

Kami dari Tim Redaksi Buletin Bang Awas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali berkreasi dengan segala informasi yang kami miliki untuk dipublikasikan kepada Sahabat Bawaslu sapaan akrab untuk publik dari Bawaslu. Pada Buletin Edisi I Tahun 2023 ini kami mengambil tema "Optimalisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024". Alasan kami mengambil tema ini sejalan dengan semangat pencegahan yang dilakukan Bawaslu pada semua Jajaran yakni Cegah, Awasi, Tindak, sehingga semangat pencegahan pelanggaran merupakan prioritas utama kami dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ada yang berbeda dengan edisi pertama tahun ini dibandingkan dengan edisi pertama tahun lalu. Edisi tahun ini akan diwarnai dengan fungsi pengawasan dan argumentasi pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2022-2027. Besar harapan kami Buletin Bang Awas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edisi I Tahun 2023 ini mengundang minat baca dari seluruh sahabat Bawaslu baik di Bangka Belitung maupun diluar Bangka Belitung. Hal ini untuk menyemarakkan semangat mengawasi dari berbagai lapisan masyarakat atau yang disebut dengan Pengawasan Partisipatif.

Secara susunan isi tidak jauh berbeda dengan Buletin Edisi sebelumnya dimana kami masih akan menampilkan informasi pengawasan yang didominasi dengan semangat pencegahan, opini-opini publik yang kami sajikan lebih tepat sasaran hingga galeri foto yang berisikan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Akhir kata kami ucapkan selamat membaca untuk seluruh sahabat Bawaslu yang menemukan Buletin ini semoga Buletin ini bisa mejadi bahan literasi yang menambah ilmu pengetahuan seputar pengawasan pemilu.

Wasalamualaikum Wr. Wb.



PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN

Pengawasan melekat pada setiap tahapan Pemilu Tahun 2024 menjadi salah satu strategi yang dilakukan Bawaslu pada semua tingkatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Pengawasan melekat ini disampaikan dan dipastikan langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi saat mengunjungi bumi laskar pelangi Belitung dalam agenda Rapat Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan beberapa waktu lalu.

Puadi memastikan agar setiap tahapan pemilu dilakukan pengawasan melekat oleh Jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran, serta membangun kerja yang profesional dan berintegritas,

“Karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan, maka jajaran Bawaslu diingatkan kembali untuk meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran, kita wajib bekerja secara profesional dan mengedepankan integritas,” ujar Puadi.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia itu mengatakan bahwa tugas Bawaslu saat ini cukup berat karena secara historis negara Indonesia belum pernah menyelenggarakan Pemilu secara serentak. Oleh karena itu ia berharap segala tahapan pemilu Tahun 2024 mendatang berjalan aman dan lancar tanpa ada hambatan yang bisa menghambat proses demokrasi di negeri ini.

“Saya sangat berharap pada Pemilu Serentak ini agar tidak banyak terjadi penyimpangan di tiap-tiap tahapannya, kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diminta agar dapat memastikan penyelenggaraan pengawasan Pemilu ini dapat dijalankan dengan baik”, pungkasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) EM Osykar dalam kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa Bawaslu dituntut untuk bekerja secara profesional dalam mengawasi Pemilu 2024. Yang menjadi poin penting juga adalah bagaimana menjaga kestabilan kinerja-kinerja pengawasan dalam masa tahapan pemilu,

“Kami butuh dukungan penuh dari Bawaslu RI, kinerja kami butuh perhatian dalam melakukan tugas-tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran khususnya”, imbuhnya. Strategi pencegahan dengan melakukan pengawasan melekat memang menjadi salah satu senjata ampuh yang saat ini terus digaungkan dan dilakukan oleh jajaran Bawaslu Babel pada semua tingkatan, setiap agenda tahapan pemilu wajib hadir jajaran Bawaslu yang melihat dan menyaksikan langsung proses dan berbagai kejadian dalam sebuah tahapan. Apabila dirasa ada hal yang kurang sesuai dengan regulasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu maka Bawaslu dapat merekomendasikan saran perbaikan terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilu tersebut.



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel lakukan pengawasan melakat tahapan penyerahan syarat bakal calon legislatif

STRATEGI DAN POLEMIK PENGAWASAN TAHAPAN SYARAT BAKAL CALON LEGISLATIF

Memasuki tahapan pencalonan khususnya penyerahan syarat Bakal Calon ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu semakin serius untuk menjalankan fungsi pengawasannya sebagai satu-satunya Lembaga pengawas pemilu yang berkewajiban untuk mencegah, mengawasi dan menindak setiap pelanggaran pemilu.

"Memaksimalkan fungsi pencegahan dengan membentuk Tim Fasilitasi pengawasan yang terdiri dari beberapa divisi, untuk saling kolaborasi dan bahu-membahu saat melakukan pengawasan secara langsung"

-Osykar-

Tercatat ada 18 Bakal Calon Anggota DPD dan 18 Partai Politik yang mendaftarkan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai peserta pemilu legislatif Tahun 2024.

Untuk memaksimalkan fungsi pencegahan pada tahapan ini, Bawaslu Babel membuat Tim Fasilitasi pengawasan, tujuannya tentu untuk melakukan fungsi pengawasan secara penuh waktu saat para Bakal Calon legislatif menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calonnya kepada KPU Babel,

"Kami memaksimalkan fungsi pencegahan dengan membentuk Tim Fasilitasi pengawasan ini terdiri dari beberapa divisi, tujuannya untuk saling kolaborasi dan bahu-membahu saat melakukan pengawasan secara langsung di lapangan," terang EM Osykar Ketua Bawaslu Babel saat ditemui di ruang kerjanya.

Sekarang pertanyaannya apa sih yang dilakukan Bawaslu Babel saat mengawasi tahapan penyerahan berkas syarat Bakal Calon Legislatif ini.

Dalam menjalankan fungsi pencegahannya Bawaslu Babel melakukan pengawasan dengan mencermati setiap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Babel dan Bakal Calon Anggota DPRD RI yang diverifikasi langsung oleh Tim Verifikator KPU Babel.

Bawaslu Babel mencermati setiap kelengkapan data baik bukti fisik yang dibawa ke kantor KPU maupun data yang diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Osykar mengapresiasi kinerja Jajaran Bawaslu dan KPU saat melakukan pengawasan dan verifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif yang hadir di KPU Babel,

"Kami mengapresiasi kinerja Jajaran kami dan juga KPU Babel, komunikasi dilapangan sangat baik, semoga ini semua berjalan sesuai dengan aturan," harap Osykar.

"Proses pengajuan daftar Bakal Calon Legislatif berjalan lancar, tidak ada kendala berarti dan kami melihat KPU bekerja dengan profesional melayani semua partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon DPD dengan baik"

-Andi Budi Prayitno-

Bawaslu Babel minimalisir potensi sengketa proses pada tahap pencalonan DPD RI dan Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi dengan adanya tim Pengawasan yang bertugas setiap harinya.

Pada tahapan pencalonan legislatif, menurut indeks kerawanan Pemilu dinilai sangat rawan sengketa proses. Untuk itu Bawaslu melakukan pengawasan melekat sebagai bentuk pencegahan terjadinya potensi sengketa proses Pemilu. Sehingga dalam masa pendaftaran bakal calon DPD RI dan DPRD Provinsi, tim Pengawasan melakukan piket ke KPU Provinsi Bangka Belitung.

"Proses pengajuan daftar Bakal Calon Legislatif berjalan lancar, tidak ada kendala berarti dan kami melihat KPU bekerja dengan profesional melayani semua partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon DPD dengan baik dan untuk sementara belum ada kendala," ujar Andi Budi Prayitno, Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa.

Kedepannya ia berharap KPU dapat membuka akses kepada Bawaslu terkait dokumen pencalonan ini sehingga Bawaslu bisa melakukan pengawasan yang lebih mendalam terkait dokumen persyaratan pencalonan.



Serah terima syarat pengajuan salah satu bakal calon anggota DPD oleh KPU Babel kepada Bawaslu Babel



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel bersama Rektor UBB dan Dekan Fakultas Hukum UBB siap berkolaborasi dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024

BAWASLU BABEL AJAK STAKEHOLDER KOLABORASI LAKUKAN PENCEGAHAN

Kolaborasi Bawaslu Babel Wujudkan Pemilu Aman, Damai dan Tenteram. Bawaslu sebagai Lembaga pengawas Pemilu tentu melakukan pengawasan Pemilu dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Hal itu dilakukan dengan merangkul segala program kerja Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Namun khusus fungsi pencegahan merupakan upaya atau langkah utama yang saat ini terus digalakkan oleh Bawaslu pada semua tingkatan. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder penyelenggara Pemilu.

Sejumlah Lembaga terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dijadikan mitra oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi pencegahan yang efektif dan efisien. Langkah pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan mengunjungi sejumlah perguruan tinggi di Bangka Belitung seperti Universitas Bangka Belitung dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka (STIH PERTIBA) Pangkalpinang. Bersama dua perguruan tinggi ini Bawaslu Babel menjalin kerjasama dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

“Sebelumnya Bawaslu Babel dan UBB telah melakukan beberapa kerja sama terkait pengawasan partisipatif dan akan terus melanjutkan bahkan mengembangkannya, hal ini semata karena Pemilu bukan hanya milik Bawaslu, tapi juga tanggung jawab bersama untuk mengawalinya, jadi kami ingin ikut ambil bagian,” ujar Ibrahim, Rektor UBB.

Sedangkan Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar menggagas akan melakukan sosialisasi langsung ke mahasiswa agar tepat sasaran, terlebih Bawaslu sendiri mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu, sehingga perlu melibatkan banyak komponen masyarakat untuk mewujudkannya.

Saat melangsungkan rapat dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Bawaslu Babel mengusung tiga program utama, yaitu sosialisasi produk hukum yang ada di Bawaslu sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar sadar hukum sehingga ikut mengawasi prosesnya. Kedua, diseminasi hukum yang cakupan bahasannya lebih luas terkait peraturan ke pemilu yang melibatkan stakeholder dari civitas akademika di Babel untuk membedah produk hukum. Terakhir yaitu melakukan kajian hukum bersama.

Kerja sama juga dilakukan dengan Perguruan Tinggi Bangka terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat terhadap pengawasan partisipatif pada pemilihan umum 2024 mendatang yang dimasukkan ke dalam kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Ketua dan Anggota Bawaslu Babel bersama Ketua STIH Pertiba dan Jajaran siap lakukan kerjasama terkait pengawasan partisipatif Pemilu 2024



Selain Perguruan Tinggi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membangun komunikasi dengan sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepulauan Bangka Belitung seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Danrem 045 Garuda Jaya Kepulauan Bangka Belitung.

Kepada sejumlah stakeholder ini Osykar menjelaskan mengenai Indeks Kerawanan Pemilu yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu RI yang menyatakan bahwa wilayah Bangka Belitung masuk kategori kerawanan rendah dan sedang.

Anggota Bawaslu Babel lainnya Jafri juga menyatakan tentang kerawanan konflik pada politik identitas, menurutnya hal itu menjadi potensi konflik saat tahapan kampanye pemilu dan pemilu berlangsung,

“Bawaslu tidak punya kewenangan secara langsung untuk mengatasi Politik Identitas dan Sara, namun yang terpenting pengawasan media sosial untuk dimaksimalkan dalam penegakan hukum,” ujar Jafri.

Jafri menjelaskan pengalaman pemilu 2019 lalu banyak akun yang memposting isu SARA di 'take down' oleh pihak yang merasa. Ia berharap adanya koordinasi yang tinggi antara Bawaslu dan Polda untuk meredam konflik melalui Politik Identitas dan Isu Sara di Babel.

Sementara diskusi terkait kerjasama yang akan dilakukan antara Bawaslu Babel dengan Korem 045 Garuda Jaya yaitu pelibatan dalam pengawasan partisipatif hingga mekanisme pengamanan pada tahapan pemilu dan pemilihan,

“Kami menggagas pengawasan partisipatif dengan melakukan program Jelajah Pengawasan untuk merangkul masyarakat terlibat dalam mengawasi pemilu, mungkin bisa kami libatkan Jajaran Korem untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat hingga ke pulau terluar,” kata Sahirin yang mengkoordinatori Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas.

Stakeholder lainnya yang juga dianggap penting berperan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu adalah Badan Intelgen Negara Daerah (Binda) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Bangka Belitung, dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel berbincang-bincang bersama Kapolda Babel dan jajaran, terkait persiapan Pemilu Serentak 2024



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel berbincang-bincang bersama Kajati Babel dan jajaran, terkait persiapan Pemilu Serentak 2024



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel foto bersama Komandan Korem 045 Garuda Jaya Babel dan jajaran, terkait kesiapan Pemilu Serentak 2024



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel foto bersama Kepala BIN Babel dan jajaran, terkait kesiapan Pemilu Serentak 2024

Bawaslu membangun semangat pencegahan dengan berbagai kegiatan yang dijalankan dengan melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai subjek tetapi menjadi objek dalam pengawasan.

SOSIALISASI PRODUK HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

"Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Terhadap Aturan Sosialisasi dan Pendidikan Politik oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024"

Senin, 15 April

SOSIALISASI JADI LANGKAH PENCEGAHAN BAWASLU

Sosialisasi merupakan salah satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilu Tahun 2024. Kali ini Bawaslu Babel melakukan sosialisasi dengan target atau sasaran seluruh Partai Politik peserta pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Babel memastikan tidak ada peserta pemilu yang kampanye di luar jadwal, oleh karena itu Bawaslu Babel melakukan sosialisasi produk hukum Bawaslu yang bertemakan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran terhadap Aturan Sosialisasi dan Pendidikan Politik oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Babel EM Osykar mengatakan bahwa pihaknya dalam melakukan sosialisasi Peserta Pemilu diharapkan memperhatikan etika dan estetika, misalnya dalam pemasangan alat peraga sosialisasi (APS). Meski belum masuk masa kampanye, ada hal yang menjadi batasan yaitu APS tidak masuk pada ranah yang kurang etis, misalnya dipasang di rumah ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas umum.

"Kami mengimbau jangan sampai atribut Parpol masuk ke rumah ibadah dan tempat pendidikan, sehingga perlu adanya upaya pencegahan, termasuk kegiatan hari ini merupakan upaya pencegahan yang kami lakukan kepada Parpol Peserta Pemilu dengan melakukan Sosialisasi Produk Hukum," imbau Osykar.

EM Osykar / Ketua Bawaslu Babel

"Kami mengimbau jangan sampai atribut Parpol masuk ke rumah ibadah dan tempat pendidikan, sehingga perlu adanya upaya pencegahan"

-EM Osykar-

Sosialisasi dan pendidikan politik memang kerap dilakukan oleh Bawaslu periode ini untuk memberikan edukasi dan mencerdaskan wawasan politik masyarakat. Osykar selaku Ketua Bawaslu Babel mengaku akan bertindak tegas kepada semua Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 apabila ditemukan melakukan gangguan kampanye sebelum masuk tahapan kampanye.

"Kami harap semua Parpol dapat menjaga keharmonisan dan kondusifitas. Suksesnya Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab Penyelenggara Pemilu saja, namun tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Pemilu yang tertib, damai, dan kondusif," harapnya.

Ketua Bawaslu Babel tersebut menekankan alasannya memberikan imbauan karena semangat Bawaslu saat ini adalah semangat pencegahan untuk menghindari agar tidak terjadi pelanggaran atau sengketa proses Pemilu.



Ketua Bawaslu Babel, Osikar saat memberi arahan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024

KOBARKAN SEMANGAT PENCEGAHAN KE JAJARAN PENGAWAS

Semangat pencegahan dalam mengawasi seluruh rangkaian tahapan pemilu terus digaungkan mulai dari Jajaran Pengawas Pemilu ditingkat pusat hingga daerah. Termasuk di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ketua Bawaslu Babel EM Osykar selalu menjelaskan pentingnya melaksanakan fungsi pencegahan kepada Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.

Ada juga sejumlah stakeholder terkait hadir dalam pertemuan itu seperti unsur Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu), Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung serta jajaran Bawaslu Kabupaten Belitung.

Untuk menerapkan langkah pencegahan yang digaungkan Bawaslu pada semua tingkatan

Osykar mengimbau agar Jajaran Bawaslu memahami setiap peraturan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

“Saya berharap jajaran Bawaslu hingga Panitia Pengawas Pemilu di semua tingkatan dapat terus membaca dan memahami peraturan yang berkenaan dengan pelanggaran karena Pengawas pemilu berperan penting dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu,” ungkapnya.

Untuk memaksimalkan langkah pencegahan ini Bawaslu telah menjalankan sejumlah program unggulan seperti senantiasa melakukan pengawasan melekat, pengawasan partisipatif, patroli pengawasan dan membuat sejumlah posko pengaduan pada setiap tahapan pemilu.



Ketua Bawaslu Babel, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan serta Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka siap melakukan pengawasan dan pencegahan pada Pemilu 2024

PETAKAN KERAWAN DPS YANG BERPOTENSI KONFLIK

Salah satu langkah tahapan pemilu Tahun 2024 yang rawan akan potensi konflik adalah penetapan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Daftar Pemilih menjadi salah satu potensi rawan lantaran kerap kali menjadi representasi dari suara yang akan diperoleh oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan rapat bersama Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) guna untuk menyamakan persepsi mengenai data pemilih pemilu 2024 baik antara Bawaslu kabupaten/kota dengan Bawaslu provinsi dan Bawaslu se Babel dengan KPU provinsi. Harapannya tentu data-data mengenai Daftar Pemilih tidak ada yang ganda atau kemungkinan data yang berbeda.

Anggota Bawaslu Babel Sahirin mengatakan agenda rakor ini selain untuk memetakan potensi kerawanan data pemilih juga dilakukan untuk menganalisis data pemilih sebagai modal pengawasan Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan oleh KPU di Babel,

“Kita juga mengkaji sasaran apa yang rawan dari data pemilih, semoga tidak ada sumber data yang berbeda dengan memanfaatkan ruang konsolidasi dan sinergi ini secara maksimal,” tuturnya.

Dijelaskan juga oleh Sahirin bahwa pihaknya ingin mengetahui apakah hasil pemuktahiran data pemilih yang dilakukan jajaran KPU sudah bisa diakses oleh jajaran Bawaslu baik menggunakan aplikasi E Coklit, Sidalih atau DPT Online.



Sahirin

(Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Babel)

Bawaslu menyadari bahwa permasalahan Daftar Pemilih ini sangat krusial, dari tahun ke tahun selalu menjadi bahan perdebatan, dan sangat mempengaruhi kepercayaan publik. Maka dari itu pengawasan pemilu utamanya menempati posisi yang sangat sentral untuk senantiasa membangun pemilu yang berkualitas agar hasilnya nanti dapat dipercaya oleh publik.

Bawaslu juga merencanakan akan menggelar rakor bersama KPU kabupaten/kota untuk menyampaikan hasil pengawasan data pemilih terutama bersinergi mengenai daerah yang berpotensi memiliki dua wilayah administratif.



Anggota Bawaslu Babel, Anggota KPU Babel serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota Koordinator divisi Pencegahan, Parmas dan Humas se- Babel, siap lakukan konsolidasi dan sinergi pada Pemilu 2024



Ketua Bawaslu Babel, Osikar bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan jajaran memastikan masyarakat kawasan pertambangan sudah tercocklit pada Pemilu 2024

KAWAL HAK PILIH HINGGA KE KAWASAN PERTAMBANGAN

Salah satu yang menjadi fokus pencegahan pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mengawal Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024. Bawaslu terus berkomitmen mengawal Hak Pilih Warga Negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih mulai dari tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, Daftar Pemilih Sementara hingga ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.

Hal ini dibuktikan dengan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga ke Kawasan pertambangan. Yaa !!! pada hari terakhir tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan Panwaslu Kecamatan Koba melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih hingga ke kawasan pertambangan timah di wilayah Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Pantauan di lapangan titik patroli pengawasan diawali pemukiman warga yang berada di sekitar wilayah eks tambang PT Koba Tin di Marbukh, Kelurahan Arung Dalam. Dari sini kemudian berlanjut ke pemukiman warga yang berada di Jongkong 12 dan Dusun Air Nona Desa Nibung. Untuk menempuh Jongkong 12 dan Dusun Air Nona akses jalan yang dilewati tidaklah mudah. Karena kondisi jalan yang kurang baik dan berlubang membuat jarak tempuh dari pusat Kota Koba memakan waktu kurang lebih satu jam.

Dalam patroli pengawasan ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel dan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah ingin memastikan bahwa cocklit di kawasan pemukiman pertambangan timah tersebut telah dilakukan 100 persen oleh Pantarlih.

“Jadi kami disini hadir melakukan monitoring guna memastikan warga disini sudah dicocklit oleh jajaran KPU,” ujar Ketua Bawaslu Babel EM Osykar.

Osykar menjelaskan kegiatan patroli pengawasan ini untuk mengawasi proses jalannya pencoklitan di hari terakhir, terkait dengan jumlah TPS tiap wilayah Kabupaten Bangka Tengah apakah sudah 100% tercocklit semua,

“Diharapkan semua warga terdaftar untuk hak pilihnya dan jika masih ada warga yg belum di Cocklit maka akan diberikan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Bangka Tengah,” jelas Osykar.

Perlu diketahui pula 14 Maret 2023 adalah hari terakhir masa pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih. Patroli dilakukan dengan mendatangi Pemilih secara langsung, menelusuri masih ada atau tidaknya warga yang tidak memiliki hak pilih dan memastikan semua warga di wilayah tersebut sudah tercocklit.



Ketua Bawaslu Babel di dampingi Ketua Bawaslu Bateng, memastikan masyarakat sekitar sudah tercocklit pada Pemilu serentak 2024



Anggota Bawaslu Babel Sahirin, saat memantau masyarakat Pulau terluar yang memenuhi syarat sudah terdaftar pada Pemilu 2024

KAWAL HAK PILIH HINGGA KE PULAU TERLUAR

Komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu khususnya mengenai hak pilih tidak tanggung-tanggung. Kali ini kawal hak pilih menyasar salah satu pulau yang bisa dibilang pulau terluar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya! kali ini Jajaran Bawaslu mengawal hak pilih hingga ke Desa Pulau Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kawal hak pilih kali ini dipimpin langsung oleh Sahirin selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas. Sahirin mengatakan bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024 nanti.

“Hari ini kami berkesempatan menyambangi dan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih pada masyarakat Desa Pulau Seliu untuk memastikan seluruh masyarakat sudah tercoklit, kalau ada yang belum terdaftar silahkan laporkan ke PPS atau Pengawas Desa kami,”

-Sahirin-



Anggota Bawaslu Babel Sahirin, saat berbincang-bincang dengan masyarakat Pulau terluar da Kabupaten bangka Tengah, memastikan mereka yang memenuhi syarat harus terdaftar pada Pemilu 2024

Ia mengatakan bahwa dari 4 TPS di Pulau Seliu sudah dilakukan pengawasan oleh Pengawas Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap ketaatan prosedur coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) dan memastikan setiap masyarakat yang memenuhi syarat sudah terdaftar sebagai pemilih.

Memastikan keterpenuhan hak pilih ini juga dilakukan untuk kalangan disabilitas, karena disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilu Tahun 2024 mendatang.

Disela-sela patroli pengawasan, sahirin menjelaskan bahwa pada hari ini bersama Bawaslu Kabupaten/Kota di Babel juga membuat posko aduan keliling. Hal tersebut bertujuan untuk menerima aduan masyarakat apabila ada yang belum terdaftar sebagai pemilih dan sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hak pilih pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil patroli pengawasan, sahirin mengatakan bahwa Proses Coklit di Pulau Seliu sudah dilakukan, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum terdaftar, hal ini dimungkinkan karena proses Coklit masih berproses dan berlangsung sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

“Kami berharap kepada Pengawas Desa Pulau Seliu untuk memastikan seluruh masyarakat di Pulau Seliu sudah di coklit 100%, hal tersebut dalam rangka menjamin Keterpenuhan hak pilih masyarakat dan tentunya tetap dengan dilakuan dengan berkoordinasi dan berkolaborasi kepada PPS, Pemdes, dan Stakeholder terkait di tingkat desa,” ujarnya.

Memang Anggota Bawaslu Babel yang mengkoordinatori Divisi Pengawasan, Parmas dan Humas ini seringkali mengutarakan pentingnya pemilu yang baik dan bersih. Hal itu menurut Sahirin bisa diwujudkan apabila kita dapat saling berkolaborasi baik itu dengan pemerintahan desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah agar tidak terjadinya praktik politik uang, dan SARA.

“Kita boleh berbeda pandangan ataupun pilihan tapi jangan jadikan itu sebagai perpecahan, mari kita jaga persatuan dan persaudaraan kita bersama”, ujarnya saat penyampaian materi pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung.

Dalam kesempatan itu, sahirin juga menyampaikan bahwa apabila nanti terdapat berbagai dugaan pelanggaran pada tahapan pemilu untuk kiranya dapat menyampaikan kepada jajaran kami Pengawas Kelurahan/Desa agar dapat kita tindaklanjuti.

Ia berharap partisipasi masyarakat Pulau Seliu dapat mencapai angka 90% pada Pemilu 2024 nanti, namun angka tersebut bukan hanya pada partisipasi penggunaan hak pilih saja melainkan juga partisipasi dalam pengawasan pemilunya agar berbagai kecurangan dan potensi dugaan pelanggaran pemilu dapat kita cegah dan minimalisir.



Anggota Bawaslu Babel, Sahirin bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung dan jajaran siap kawal Hak Pilih masyarakat pada Pemilu 2024

PENTINGNYA PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu, KPU, dan DKPP ialah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang terkait kelembagaan pengawasan Pemilu, terlebih pada Pemilu 1982 dengan nama Panwaslak. Kelembagaan pengawas yang awalnya bersifat ad hoc sesuai UU No. 12 tahun 2003, kemudian bersifat tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Lembaga pengawas ini lantas diperkuat lagi secara kelembagaan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011. Terakhir, melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu terus diperkuat, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu tidak semata menjadi lembaga pemberi rekomendasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Pemilu sebelumnya, namun juga menjadi lembaga eksekutor atau pemutus perkara.

Fungsi inilah yang kemudian ingin dipertajam oleh Bawaslu baik ditingkat nasional, tingkat provinsi, hingga ketingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk melakukan penguatan tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Rapat Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pengawas Pemilu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

“Kami ingin menginventarisir apa yang menjadi kendala Bawaslu ditingkat kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga segala bentuk potensi pelanggaran bisa dicegah sedini mungkin,” kata Jafri.



Dengan terselenggaranya rapat penguatan kelembagaan ini Jafri berharap seluruh kinerja pengawasan dapat berjalan lancar serta segala bentuk potensi pelanggaran bisa dicegah sedini mungkin.

Yang tidak kalah penting dalam penguatan kelembagaan ini adalah bagaimana kita memperhatikan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga tercipta Pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Keberadaan Bawaslu dalam fungsi pengawasan yakni pencegahan dan penindakan serta fungsi Quasi peradilan yakni penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu juga sangat penting mempertimbangkan nilai-nilai tersebut.

Kami juga menilai bahwa penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dapat terwujud secara baik apabila pengaturan, pelaksanaan dan penegakan Hukum dalam Pemilu harus dapat merepresentasikan asas-asas di mana Pemilu merupakan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dapat berlangsung. Menurut penulis, Pemilu bukan hanya semata-mata pada sebuah Prosedural namun ada substansi serta regulasi dari Pemilu itu sendiri, serta Penguatan Kelembagaan Sistem Pemilu menjadi suatu hal yang terpenting.



Anggota Bawaslu Babel, Jafri (tengah) didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Babar dan Kepala Sekretariat Bawaslu Babel, saat memberi arahan dalam kegiatan penguatan kelembagaan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota se Babel



Anggota Bawaslu Babel saat memberi arahan terkait Aplikasi Sigap Lapor dan JDIH di Kanror Sekretariat Bawaslu Bangka Tengah

Andi Budi Prayitno

(Koordinaor Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Babel)

MAKSIMALKAN SIGAP LAPOR DAN JDIH DEMI CEGAH PELANGGARAN PEMILU

Bawaslu terus melakukan terobosan terbaru untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi saat menjalankan fungsi pencegahan dalam mengawasi tahapan pemilu. Berbagai Upaya dan inovasi terus dikembangkan untuk memudahkan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Sebagai contoh saat ini Bawaslu sudah menggunakan website yang bernama Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan atau Sigap Lapor untuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dan website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau lebih dikenal JDIH. Kedua website ini mempunyai fungsi yang berbeda namun keduanya masih dalam rangka melaksanakan tujuan sebagai Lembaga pengawas pemilu yakni melaksanakan fungsi pencegahan dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.

Dalam memaksimalkan penggunaan website ini Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Andi Budi Prayitno, didampingi Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Babel Yaumil Ikrom, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan Sigap Lapor dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu.

Andi menyampaikan pentingnya aplikasi Sigap Lapor dalam memberi pelayanan kepada masyarakat terkait penanganan pelanggaran Pemilu, menurutnya website ini dapat mempermudah publik dalam melaporkan pelanggaran secara online dan laporan yang masuk bisa lebih tersipkan dengan rapi,

“Aplikasi Sigap Lapor merupakan langkah terobosan dan upaya adaptasi Bawaslu dengan perkembangan teknologi digital mutakhir, yang diharapkan dapat memberikan jawaban kepada publik dalam hal ini masyarakat, peserta pemilu, termasuk peneliti, akademisi dan pemantau pemilu atas kebutuhan mereka dalam memperoleh layanan yang cepat dan mudah terkait penanganan pelanggaran pemilu”, ungkap Andi.

Selain mendorong akselerasi penggunaan teknologi digital yang dikemas dalam sistem aplikasi di internal Bawaslu, keberadaan Sigap Lapor bisa memaksimalkan kesiapan dalam mencegah, mengawasi, dan menangani pelanggaran pemilu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mereka, regulasi, dan peningkatan kerja di bidang penanganan pelanggaran.

Sementara terkait dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) keberadaannya adalah sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,

“JDIH juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat, sehingga harus selalu ada penyempurnaan dalam JDIH dan tentunya penyajiannya sesuai dengan SOP yang berlaku, pengelolaan JDIH yang baik dapat menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sehingga dapat meningkatkan public trust dalam pelayanan publik”, ujar Andi.

Ia berharap kedepan JDIH Bawaslu memberikan pelayanan terbaik terkait pengelolaan produk hukum melalui JDIH serta meningkatkan kualitas layanan JDIH Bawaslu di Babel.



Dewi Rusmala

(Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Datin Bawaslu Babel)

"Dalam proses penanganan pelanggaran pidana pada Pemilu 2024, harus disikapi dengan persamaan persepsi, karena yang akan memutuskan apakah termasuk pelanggaran pidana Pemilu atau tidak adalah Sentra Gakkumdu"

-Dewi Rusmala-

BAWASLU DAN KPU HARUS PUNYA KOMITMEN BERSAMA DALAM MENEMUKAN DUGAAN PELANGGARAN

Banyak langkah dan cara sebagai Lembaga pengawas pemilu untuk melaksanakan fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu. Seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pencalonan DPR, DPD, dan DPRD, bertempat di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Babel.

Tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk menyamakan persepsi Sentra Gakkumdu terkait pola penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Namun pada agenda kali ini Bawaslu mengkhususkan pembahasan pada kasus pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam tahapan Pendaftaran Calon Legislatif dan Calon Perseorangan DPD. Hal ini tak terlepas dari tahapan pencalonan Anggota Legislatif yang akan diawasi secara melekat oleh Jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam agenda ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memilih Anggota Bawaslu RI Periode 2017-2022, Fritz Edward Siregar sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Dalam paparannya Fritz menjelaskan bahwa Bawaslu bersama unsur Sentra Gakkumdu lainnya harus bisa belajar dari pengalaman Pemilu 2019 dalam menyelesaikan Temuan/ Laporan Pelanggaran pidana Pemilu,

"Undang-undang tidak mengalami perubahan, Pemilu 2024 masih menggunakan UU 7 Tahun 2017,

oleh karena itu harusnya penyelenggara Pemilu bisa belajar dari pengalaman yang lalu harus membuat kita mampu mengantisipasi potensi pelanggaran yang ada," ujar Akademisi STH Indonesia Jentera ini.

Berdasarkan data penanganan pelanggaran pidana pada Pemilu 2019, tren pelanggaran terbanyak didominasi perbuatan pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu pada tahap pencalonan DPR, DPD, dan DPRD yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 520 UU 7 Tahun 2017.

Oleh karena itu dibutuhkan kerja bersama antara KPU dan Bawaslu serta Sentra Gakkumdu untuk menemukan adanya dugaan penggunaan dokumen palsu. Dalam Perbawaslu maupun PKPU memang tidak ada kewajiban bagi KPU memberikan dokumen kepada Bawaslu. Sehingga sulit bagi Bawaslu menemukan indikasi dokumen palsu.

Anggota Bawaslu Babel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Dewi Rusmala yang berharap dalam proses penanganan pelanggaran pidana pada Pemilu 2024 harus disikapi dengan persamaan persepsi,

“Undang-undang tidak mengalami perubahan, Pemilu 2024 masih menggunakan UU 7 Tahun 2017, oleh karena itu harusnya penyelenggara Pemilu bisa belajar dari pengalaman yang lalu harus membuat kita mampu mengantisipasi potensi pelanggaran yang ada,”

-Fritz Edward Siregar-



Fritz Edward Siregar

Anggota Bawaslu RI Periode 2017-2022

“Karena yang akan memutuskan apakah termasuk pelanggaran pidana Pemilu atau tidak adalah Sentra Gakkumdu. Dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu harus ada satu persepsi, terkhusus Sentra Gakkumdu yang ada di wilayah Bangka Belitung,” pungkasnya.

Dalam unsur sentra Gakkumdu, selain Bawaslu tentu ada juga unsur kepolisian dan unsur kejaksaan.

Mewakili unsur kepolisian, Direktur Reskrimum Polda Babel Kombes I Nyoman Mertha Dana selaku Koordinator Sentra Gakkumdu Babel menyampaikan bahwa semua unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus punya komitmen bersama dalam proses penanganan pelanggaran Pidana Pemilu.

“Terlepas nanti Laporan/ Temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu yang kita proses hasil akhirnya termasuk pelanggaran atau tidak, kita harus duduk bersama, selesaikan bersama untuk menyamakan persepsi,” ujarnya.

Selama ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk menyamakan pemahaman antara ketiga unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dewi yang mewakili Jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat itu berharap Sentra Gakkumdu semakin padu dan bertindak berdasarkan pemahaman yang sama berdasarkan regulasi harus bisa belajar dari pengalaman Pemilu 2019.



Anggota Bawaslu Babel, Dewi Rusmala di dampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Babel saat foto bersama jajaran Sentra Gakkumdu Bawaslu Babe (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan)



KETERBUKAAN INFORMASI JADI STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN

Sejak beberapa tahun terakhir Keterbukaan Informasi Publik memang menjadi andalan sekaligus menjadi salah satu prioritas utama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menciptakan kepercayaan publik yang diwujudkan dengan prestasi berupa sejumlah penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah meraih predikat informatif pertama dari seluruh Bawaslu se-Indonesia. Belum lagi penghargaan Keterbukaan Informasi Publik lainnya seperti pengelolaan media sosial dan koordinasi dengan media massa menjadi unggulan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi Keterbukaan Informasi Publik di kancan nasional.

Sejalan dengan itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang akan dilakukan oleh Bawaslu Babel kepada Bawaslu kabupaten/kota di Babel.



Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Koordinator Sekretariat serta jajaran Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Babel saat mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Bawaslu Babel

"Menjelang era 5.0, Bawaslu sebagai lembaga publik harus bisa beradaptasi, ke depan komisioner dan staf harus familiar mengetahui teknologi digital,"

-Andi Budi Prayitno-

Dewi Rusmala yang memang mengkoordinatori Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi ini menyampaikan harapannya agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tujuh kabupaten/kota di Babel mendapatkan kategori informatif.

"Jadi kita memberikan sosialisasi teknis dalam rangka proses penilaiannya. Ada soal yang umum. 30 soal dari Bawaslu RI dan lima soal khusus dari provinsi. Ini untuk melihat penilaian sudah informatif atau tidak informatif," kata Dewi.

Menurut dia, evaluasi yang dilakukan tersebut, agar PPID kabupaten/kota sama dengan PPID Bawaslu Babel, sejak tahun 2019 hingga 2022, mendapatkan kategori informatif. Dewi yang merupakan satu-satunya srikandi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memang kerap kali intens berkomunikasi mengenai informasi yang harus dibuka kepada masyarakat terhadap staf-stafnya.

Menurutnya selama informasi tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan, maka informasi tersebut wajib disebarluaskan dan diberikan kepada masyarakat.

Selaras dengan itu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Andi Budi Prayitno mengatakan dalam era digital sebagai lembaga publik, Bawaslu dituntut untuk memberikan informasi.

"Digitalisasi wajib untuk dilakukan. Menjelang era 5.0, Bawaslu sebagai lembaga publik harus bisa beradaptasi. Ke depan, komisioner dan staf harus familiar mengetahui teknologi digital," tukasnya.

Hingga saat ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus berkomitmen untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pada segala sarana informasi yang dimiliki seperti media sosial, website resmi Lembaga, website PPID Lembaga, melalui sarana bulletin bahkan melalui jejaring media yang senantiasa mempublikasikan segala informasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Anggota Bawaslu Babel di dampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Babel dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Babel lakukan foto bersama dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Ketua Bawaslu Babel dan Pj. Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung lakukan penandatanganan berita acara dana hibah Pilkada 2024

BAWASLU DAN PEMPROV BABEL TANDATANGANI BERITA ACARA DANA HIBAH PILKADA 2024

Anggaran menjadi hal krusial dalam menyukseskan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada Tahun 2024 mendatang. Terlebih lagi anggaran untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada karena anggaran Pilkada bersumber dari APBD bukan dari ABPN. Setiap daerah harus mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan pelaksanaan tahapan Pilkada yang ada di masing-masing provinsi seluruh Indonesia.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah secara resmi melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel di rumah dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Penandatanganan Berita Acara tersebut dilakukan langsung oleh EM Osykar selaku Ketua Bawaslu Babel dan Suganda Pandapotan Pasaribu selaku Pj. Gubernur Babel. Adapun dana hibah yang disepakati tersebut senilai 20 Miliar 807 Juta 570 Ribu Rupiah. Jumlah itu mengalami pengurangan dari pengajuan dana hibah awal kisaran 26 Miliar Rupiah.

“Alhamdulillah hari ini sudah penandatanganan berita acara dana hibah, dari nilai yang disepakati ini akan kami manfaatkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana perintah undang-undang kepada Bawaslu dalam mengawasi setiap pelaksanaan tahapan pilkada,” kata Osykar.

Osykar yang didampingi Jafri dan Andi Budi Prayitno selaku Anggota Bawaslu Babel menjelaskan bahwa dana hibah yang disepakati ini sudah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan efektif dan efisiensi fungsi anggaran.

Pengelolaan anggaran khususnya dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan Bawaslu haruslah tepat sasaran dengan mengedepankan prinsip akuntabel, dimana anggaran sebaiknya digunakan sesuai dengan porsi dan peruntukannya untuk menghasilkan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dengan mengutamakan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



Anggota Bawaslu Babel, Jafri di dampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Babel dan Pejabat Struktural Bawaslu menyampaikan anggaran hasil verifikasi dana hibah kepada Badan Kesbangpol

Meski demikian Ketua Bawaslu Babel ini mengaku masih bisa dilakukan penyesuaian anggaran dana hibah untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada Tahun 2024 mendatang, sebelumnya dilakukannya pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Bulan September mendatang,

“Pelaksanaan fungsi pengawasan ini sifatnya dinamis, jadi sesuai dengan kebutuhan dana hibah ini bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan saat melaksanakan fungsi pengawasan,” tutup Osykar.

Perlu sahabat Bawaslu ketahui juga, bahwa sebelumnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pertemuan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Babel Jafri, Kepala Sekretariat Roy M Siagian beserta jajaran pejabat struktural dilingkungan Bawaslu Babel.

Pertemuan itu dalam rangka diskusi serta penyampaian anggaran hasil verifikasi atas usulan dana hibah Pilkada 2024 yang sebelumnya telah diusulkan oleh Bawaslu Babel kepada Badan Kesbangpol.



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel didampingi Pj. Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung dan jajaran saat melakukan foto bersama setelah melakukan penandatanganan dana hibah Pilkada 2024



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI MELALUI EVALUASI MATURITAS SPIP

Sebagai lembaga pengawas pemilu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya mewujudkan lembaga wilayah bebas korupsi dalam mempersiapkan pelaksanaan evaluasi maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Tujuannya untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Bawaslu telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Tim Irwil III Bawaslu RI pada Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditanggapi oleh Roy M Siagian selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Babel.

Menurutnya Bawaslu Babel merupakan salah satu dari 3 provinsi di Inspektorat Wilayah III yang akan diusulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sehingga perlu dipersiapkan mengenai evaluasi maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Jafri selaku Anggota Bawaslu Babel yang membidangi SDMO dan Diklat juga menyampaikan terkait dukungannya terhadap pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP yang nantinya akan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu,

Menurutnya Bawaslu Babel merupakan salah satu dari 3 provinsi di Inspektorat Wilayah III yang akan diusulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sehingga perlu dipersiapkan mengenai evaluasi maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Jafri selaku Anggota Bawaslu Babel yang membidangi SDMO dan Diklat juga menyampaikan terkait dukungannya terhadap pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP yang nantinya akan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu,

“kita harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan evaluasi SPIP ini untuk mencapai status WBK ini agar Bawaslu Babel nantinya dapat menjadi contoh wilayah bebas korupsi (WBK), apalagi sekarang negara sedang gencar melawan korupsi, intinya kami dari pimpinan sangat mendukung upaya reformasi birokrasi yang kita cita-citakan,” sambut Jafri.

Bawaslu Babel bersama jajaran akan mengupayakan yang terbaik untuk pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP ini dan berharap semoga tim Bawaslu RI dapat melengkapi pemenuhan SPIP tersebut.



Anggota Bawaslu Babel Jafri di dampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Babel dan Tim Irwil III Bawaslu RI saat memberi arahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).



STRATEGI PERENCANAAN KEUANGAN JELANG PILKADA 2024

Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 membutuhkan persiapan yang cukup matang agar fasilitasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar dan tanpa kendala apapun. Pasalnya keuangan menjadi hal vital dalam fasilitasi pengawasan yang berkaitan dengan realisasi anggaran dalam mengawasi tahapan pemilu Tahun 2024.

Salah satu langkah atau strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan melakukan pemenuhan data dukung atas permintaan data untuk kebutuhan Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran serta Profiling Resiko Kecurangan dilakukan dengan cara mengunggah data ke dalam link google drive yang telah disediakan oleh Tim BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yang tak kalah penting dalam agenda ini adalah Tim Evaluasi Akuntabilitas BPKP melakukan brainstorming mengenai proses perencanaan anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Tim BPKP melakukan rekonsiliasi atas pemenuhan data dukung atas permintaan data untuk keperluan Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran.

Ini penting karena berkaitan dengan struktur pendanaan dan penganggaran usulan dana hibah dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Penelaahan dan penelitian atas Usulan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilakukan dengan melihat kesesuaian penyusunan anggaran dengan kaidah-kaidah penganggaran dan peraturan yang berlaku.

"Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 membutuhkan persiapan yang cukup matang agar fasilitasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar"



Kepala Sekretariat Bawaslu Babel di dampingi Kabag. Administrasi Bawaslu Babel dan jajaran, saat mendengarkan arahan dari Ketua Tim Evaluasi Akuntabilitas BPKP

Statregi jitu berikutnya dalam Focus Group Discussion (FGD) BPKP melakukan pemetaan atas potensi terjadinya kecurangan dengan melakukan identifikasi atas tingkat kemungkinan dan tingkat dampak terjadinya resiko kecurangan (fraud) pada Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dari segi perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban hingga proses pengadaan barang dan jasa pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tim Evaluasi Akuntabilitas BPKP bersama dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemetaan atas kesesuaian antara usulan dana hibah Pemilihan Tahun 2024 dengan Draft Rencana Kerja serta Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024.

Dari hasil pemetaan, belum terdapat kesesuaian antara RAB usulan anggaran dengan Renja dan Sasaran Strategis pada Renstra dikarenakan penyusunan anggaran mengacu pada Keputusan Ketua tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya, BPKP melakukan identifikasi atas potensi terjadinya inefektifitas dan inefisiensi penyusunan anggaran Pemilihan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Kepala Sekretariat Bawaslu Babel di dampingi Kabag. Administrasi Bawaslu Babel dan Ketua Tim Evaluasi Akuntabilitas BPKP lakukan foto bersama



Bawaslu hingga jajaran badan adhoc dalam melakukan pengawasan dengan dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Penguatan strategi pencegahan dengan metode yang baik, tepat serta partisipatif masyarakat maka akan terbangun optimisme besar dari publik dalam rangka mewujudkan Pemilu Serentak 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Husin, S.Pd. (Ketua KPU Babel)



Perjalanan untuk menentukan kepemimpinan akan dimulai pada tahun 2024. Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib disambut dengan kemeriahan. Pemilihan umum yang akan dilaksanakan seharusnya hadir untuk rakyat, dari rakyat dan diawasi oleh rakyat.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan menjalankan pengawasan partisipatif. Pemilihan Umum harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung berarti setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya tanpa diwakili oleh siapapun. Umum berarti pemilu yang diselenggarakan harus terbuka untuk umum, bersifat transparan, sehingga akuntabilitas pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bebas berarti setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan hak memilihnya kepada setiap kandidat manapun tanpa tekanan dari siapapun. Rahasia berarti setiap warga negara berhak untuk tidak menyiarkan kandidat yang dipilihnya di dalam proses pemilihan.

Sedangkan jujur dan adil berarti setiap penyelenggara atau aparatur negara yang terlibat di dalam proses pemilu atau pilkada, mulai dari tahap awal hingga akhir diselesaikannya sengketa pemilu/pilkada, harus bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan proses pemilu. Bersama Bawaslu mari kita jaga penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
(Akademisi Universitas Bangka Belitung)



Bawaslu merupakan lembaga representasi publik yang berwenang serta turut andil menciptakan iklim sehat dan damai pada panasnya suhu politik. Sebagai masyarakat pemilih bagian variabel dari Pemilihan Umum penentu demokrasi bangsa, optimis Bawaslu akan melakukan pengawasan yang maksimal dengan mengedepankan metode preventif agar pemilu lebih bermartabat.

Rusdiar, S.AP., M.Si.

(Ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023 – 2028)



Mewujudkan demokrasi yang baik itu butuh keseriusan dan sistem yang baik sertapartisipasi masyarakat, saya yakin publik percaya dengan metode yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan ketidak jujuran dalam pemilu, dan marikita dukung Bawaslu dengan metode pengawasan saat ini agar pelanggaran dapat lebih awal dicegah pelanggarannya.

Dr. H. Iskandar, S.Ag., M.Hum.

(Ketua Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028)



Pemilu sebagai epistimologi Demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pengawasan. Bawaslu sebagai Lembaga yang Mengawasi sekaligus memberikan Upaya Pencegahan. Saya meyakini dan optimis bahwa strategi pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu melalui metode pencegahan dalam mengantisipasi pelanggaran penyelenggaraan pemilu berjalan sudah tepat sasaran. Keyakinan tersebut berdasarkan cukup kondusifnya arus informasi secara berkala serta aktifitas pencegahan yang dilakukan pengawas hingga saat ini.

Imam Ghozali, S.Psi., M.Si.

(Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Babel



Sebagai jurnalis saya optimistis Bawaslu mampu melaksanakan pengawasan, penindakan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Penguatan terhadap Bawaslu juga telah dibuktikan negara dengan masa penugasan lima tahunan, dari sebelumnya adhoc sesuai tahapan pemilu atau pilkada. Bawaslu teruslah bekerja hadir langsung di tengah tahapan pemilu/pilkada.

Heru Dahnur, S.S., M.Hum.

(Jurnalis Kompas.Com)

